

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah panjang perkembangan Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonial Belanda yang berkuasa di Surabaya. Wilayah Surabaya yang pada awalnya merupakan daerah rawa-rawa dekat pantai. Surabaya hanya merupakan sebuah wilayah pelabuhan kecil jika dibandingkan dengan wilayah Gresik ataupun wilayah Tuban yang terlebih dahulu menjadi wilayah pelabuhan besar. Perkembangan Surabaya pada awalnya tidak terlalu diperhatikan karena dianggap sebagai wilayah yang kurang menjanjikan mengingat wilayah-wilayah disekitarnya yang sudah memiliki pelabuhan yang cukup sibuk.

Kedatangan rombongan Belanda di Surabaya kemudian merubah cara pandang mereka terhadap Surabaya. Para orang Belanda yang datang ke Surabaya pada abad ke-16 hingga 17 tersebut melihat potensi wilayah Surabaya yang dapat dikembangkan menjadi wilayah pelabuhan yang besar dan sibuk. Hingga Belanda kemudian menguasai Surabaya, membuat posisi Surabaya sebagai kota pelabuhan cukup diperhitungkan. Para orang Belanda yang berkuasa di Surabaya berusaha untuk membuat sebuah kota pelabuhan yang

dipadukan dengan kota industri di wilayah Surabaya. Kekuasaan kolonial Belanda banyak merubah kehidupan dan pola aktivitas pada masyarakat di Surabaya. Dengan semakin berkembangnya Surabaya sebagai wilayah ekonomi di bawah kendali kekuasaan Belanda, membuat banyak orang-orang Eropa terutama Belanda untuk mulai berdatangan ke Surabaya terutama pada awal abad ke-19. Kedatangan banyak masyarakat Eropa di Surabaya kemudian kian meningkatkan pengaruh Eropa dalam pemerintahan hingga ekonomi baik juga pada segi sosial-masyarakat Surabaya yang sangat dipengaruhi oleh orang-orang Eropa.

Pada masa kekuasaan Belanda, Surabaya pada awalnya merupakan wilayah yang terbagi menjadi tiga kategori administrasi, yakni karisidenan, kabupaten, dan distrik. Hingga pada tahun 1906, wilayah Surabaya kemudian ditetapkan menjadi Gemeente dengan berdasarkan peraturan *Ordonnantie Staatsblad* No.149/1906 tertanggal 1 April 1906.¹ Melalui peraturan tersebut membuat perubahan dalam status administrasi Surabaya dengan terbentuknya wilayah Kota Surabaya sebagai salah satu wilayah administrasi otonom. Perubahan status administrasi ini yang juga membuat perkembangan pada Kota Surabaya pada saat itu berkembang sangat pesat karena semakin masifnya kegiatan ekonomi pada sektor industri dan pelabuhan. Selain itu, perubahan

¹ *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*, no. 149, 1906.

sistem pemerintahan kemudian dapat menunjang berbagai perkembangan pada berbagai sektor melalui pengambilan kebijakan-kebijakan yang dinilai cukup strategis dan menguntungkan.

Perkembangan Kota Surabaya yang cukup pesat turut mengundang banyaknya pendatang untuk bertempat tinggal di Surabaya. Hal ini membuat Surabaya menjadi cukup penuh dengan berbagai kelompok masyarakat yang datang dari berbagai penjuru tempat. Muncul beberapa kelompok masyarakat yang kemudian oleh pihak gemeente Surabaya dikelompokkan berdasarkan etnis mereka seperti etnis Eropa, etnis Timur Asing (Arab dan Cina), dan etnis pribumi. Pengelompokan ini tentunya didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu terutama untuk memberikan keistimewaan pada kelompok etnis Eropa yang memegang peranan kekuasaan dalam pemerintahan di Surabaya.

Pembagian etnis ini pada dasarnya sudah dilakukan jauh sebelum terbentuknya gemeente Surabaya pada tahun 1906. Pembagian tersebut merupakan hasil dari pemisahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sebagaimana tercantum dalam *Regerings Reglement* tahun 1854.² Pada *Regerings Reglement* tersebut pembagian etnis terbagi menjadi 3 lapisan, lapisan pertama merupakan orang-orang golongan Eropa, terutama orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Lapisan kedua merupakan golongan

² Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 94-95.

Timur Asing, dalam hal ini terdapat etnis Cina, Arab, India, Jepang dan negara-negara Asia lain. Pada lapisan ketiga atau yang paling bawah merupakan golongan masyarakat Bumiputera.

Pemerintahan gemeente Surabaya dengan hampir keseluruhan dipegang oleh para orang-orang Eropa, meskipun dari kelompok etnis lain juga mendapatkan jabatan di pemerintahan tetapi tidak sebanyak orang-orang Eropa. Tentunya hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota yang memang sangat berpihak terhadap kelompok etnis Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya sangat memberatkan kelompok etnis lain seperti Timur Asing dan pribumi. Terlebih lagi pada kelompok masyarakat pribumi semakin dipojokan dengan dilaksanakannya berbagai kebijakan gemeente. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dinilai sangat menguntungkan masyarakat etnis Eropa dengan merugikan masyarakat pribumi.

Kebijakan pembagian etnis yang kemudian membagi kelas sosial di tengah masyarakat sangat mempengaruhi kondisi sosial terhadap pandangan antar etnis. Etnis Eropa yang kemudian dijamin sebagai etnis paling tinggi tentunya mendapatkan berbagai fasilitas yang lebih memadai dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Sedangkan pada kelompok masyarakat pribumi

menjadi kelompok masyarakat dengan kelas sosial paling rendah. Hal tersebut membuat mereka tidak banyak diperhatikan oleh pemerintah kota.

Sebagai kelompok etnis yang dianggap memiliki kelas etnis yang paling tinggi. Masyarakat Eropa kemudian difasilitasi oleh banyak hal melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kemudahan dalam memperoleh fasilitas seperti perumahan, kesehatan, air bersih, hingga fasilitas pemakaman yang dapat dikatakan sebagai fasilitas yang cukup elit. Jika dibanding dengan kelompok etnis lainnya seperti etnis Cina, Arab atau bahkan masyarakat pribumi, fasilitas ataupun kemudahan yang diperoleh masyarakat Eropa dapat dikatakan berbanding terbalik. Melihat kondisi tersebut, masyarakat dari etnis lain tentunya dapat menilai bahwa pemerintahan yang berkuasa di Surabaya dinilai sangat mengedepankan masyarakat Eropa jika dibandingkan dengan kebijakannya terhadap masyarakat etnis lainnya yang ada di Surabaya.

Pemenuhan fasilitas masyarakat yang terfokus pada etnis Eropa oleh pemerintah kota tercermin seperti pada pembangunan fasilitas pemukiman yang kemudian dibangun untuk diperuntukan pada orang-orang Eropa. Pada tahun 1906 dan tahun 1916 dilakukan pembelian beberapa ratus hektar tanah di wilayah Gubeng dan juga wilayah Ngangel. Pembelian tanah tersebut tentunya

diperuntukkan untuk kawasan pemukiman Eropa.³ Pembangunan pemukiman Eropa kemudian menimbulkan masalah yang cukup serius, bagi masyarakat pribumi dengan pembangunan pemukiman Eropa yang sangat luas dapat mendesak pemukiman mereka atau bahkan dapat mengusir pemukiman mereka. Hal yang terjadi pada dasarnya pembangunan kawasan pemukiman Eropa seringkali tidak menghiraukan pemukiman pribumi yang berada dikawasan tersebut atau disekitarnya.

Kebijakan pembagian etnis juga tidak hanya pada pemukiman saja, tetapi lebih jauh juga mempengaruhi pada sektor ekonomi yakni pekerjaan, hingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota yang dinilai lebih berpihak pada etnis Eropa. Selain hal tersebut, pemerintah kota juga sangat memperhatikan terhadap penggolongan etnis dalam berbagai aktivitas masyarakatnya. Kebijakan terkait pemakaman juga tertuang dalam *Gemeente Soerabaia: Verordeningen* yang dimuat pada tahun 1918. Dalam kebijakan tersebut tertuang kebijakan-kebijakan *Gemeente* terkait peraturan pemakaman seperti peraturan pemakaman etnis Eropa, peraturan pemakaman masyarakat pribumi atau muslim, peraturan pemakaman etnis Cina, dan juga diatur tentang pemakaman etnis Arab. Pihak pemerintah kota mengatur dalam kebijakannya

³ Widi Sudarmawan dan Purnawan Basundoro. “Aktivitas Gemeente Surabaya Tahun 1906-1942.”, dalam *VERLEDEN: Jurnal Kesenjarahan*, vol. 3, no. 1, hlm. 2.

yang dituangkan dalam peraturan untuk mengatur tentang kebijakan pemakaman yang digolongkan sesuai etnis.

Dengan adanya kebijakan tersebut kemudian menimbulkan adanya pengelompokan kawasan pemakaman yang muncul yakni kawasan pemakaman khusus Eropa, kawasan pemakaman etnis Arab, kawasan pemakaman etnis Cina, hingga kawasan pemakaman untuk masyarakat pribumi. Lebih lanjut pembagian etnis dalam perihal kawasan pemakaman juga menentukan letak dari kawasan pemakaman tersebut. Pemerintah kota kemudian juga menentukan kebijakan yang diterapkan pada masing-masing kawasan pemakaman. Melihat kebijakan tersebut, pemerintah kota semakin mempertegas tentang lapisan sosial yang ada dalam sosial-masyarakat yang ada. Pembagian tersebut tentunya juga dianggap lebih memfasilitasi masyarakat Eropa dan menganggap masyarakat pribumi sebagai masyarakat buangan.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penulisan skripsi, penggunaan rumusan masalah untuk membatasi pembahasan dalam penulisan ini sangatlah penting agar tetap membahas fokus pada pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diuraikan dirumuskan yang dapat disampaikan yakni:

Bagaimana pelaksanaan peraturan pembagian kawasan pemakaman etnis Eropa di *Gemeente* Surabaya dpada tahun 1906-1942?

1.3 Tujuan dan Mafaat

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kota tentang kawasan pemakaman yang terbagi dalam pembagian etnis yang dikeluarkan oleh *gemeente* Surabaya. Dalam peneltian ini diharapkan dapat mendeskripsikan tentang penerapan kebijakan tersebut selama masa pemerintahan *gemeente* Surabaya yang berlangsung dari tahun 1906 hingga tahun 1942.

Manfaat penelitian ini secara umum yakni untuk memberikan sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang sejarah. Dengan penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan serta pengetahuan dan menjadi acuan bagi siapapun untuk rujukan dalam penulisan sejarah Kota Surabaya pada masa kolonial. Penulisan ini juga dapat menjadi rujukan dalam pemberian gambaran tentang kebijakan pemerintah kolonial terutama masa pemerintahan *Gemeente* Surabaya terhadap kebijakan tentang pemakaman atau pembagian kawasan pemakaman dari tahun 1906 hingga 1942.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penulisan ini menggunakan beberapa bahan pustaka penunjang sebagai sarana ide mengenai sejarah tentang kebijakan pembagian etnis dan kehidupan kelompok etnis di Surabaya pada masa kolonial. Cukup banyak tulisan yang dapat penulis temui, akan tetapi penulis dapat membaginya dan memfokuskan pembasan yang cukup relevan dengan pembahasan penulisan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Beberapa tulisan tersebut dapat berupa jurnal ataupun buku.

Berdasarkan hasil tinjauan studi pustaka tersebut, melalui kajian ini penulis bermaksud akan menjelaskan tentang kebijakan gemeente Surabaya dalam hal pembagian kawasan pemakaman yang didasarkan pada kelas etnis. Sebagai pendukung, penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa bahan pustaka untuk keperluan referensi dan sumber penulisan. Pertama, jurnal yang berjudul *Penduduk dan Hubungan Antaretnis di Kota Surabaya Pada Masa Kolonial*⁴ yang ditulis oleh Purnawan Basundoro. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang kondisi sosial yakni hubungan yang terjadi pada masyarakat antar etnis di Surabaya pada masa kolonial. Dalam pembahasan penelitian yang akan diteliti juga didasarkan pada hubungan antar etnis yang terjadi pada masa kolonial terutama pada masa pemerintahan *gemeente*.

⁴ Purnawan Basundoro, "Penduduk dan Hubungan Antaretnis di Kota Surabaya Pada Masa Kolonial." dalam *Pramita* (22): 1.

Kedua, buku yang berjudul *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*⁵ yang ditulis oleh Sarkawi B. Husein. Pada bab yang berjudul Surabaya Dalam Lintasan Kekuasaan, dibahas tentang pembagian kawasan pemukiman yang didasarkan pada pembagian kelas etnis di Surabaya. Pada bab lainnya yang berjudul Makam Tionghoa Sebagai Simbol Ruang Suci: Kontrol, Konflik, dan Negosiasi juga dijelaskan tentang keberadaan kawasan pemakaman etnis Cina di Surabaya hingga permasalahan yang muncul di dalamnya. Keberadaan kawasan pemakaman Cina di Surabaya juga menjadi bagian dari kebijakan pembagian kawasan pemakaman yang didasarkan etnis nantinya juga menjadi salah satu dasar pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Makam Di Surabaya Masa Kolonial 1906-1930*⁶ yang ditulis Imam Zuhdi Huda. Skripsi ini membahas tentang keberadaan kawasan pemakaman yang ada di Surabaya pada masa Hindia Belanda dari tahun 1906-1930. Pembahasan yang secara sekilas hamper sama yang akan penulis teliti, akan tetapi pada perbedaannya dalam pembahasan yang akan penulis kembangkan yakni berfokus pada kebijakan yang

⁵ Sarkawi B, Husein. *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*. (Jakarta: LIPI Press, 2010).

⁶ Imam Zuhdi Huda, *Makam di Surabaya Masa Kolonial 1906-1930*, Skripsi, Universitas Airlangga, 2005.

dikeluarkan oleh gemeente Surabaya terkait pembagian etnis dan dampak yang dimunculkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian yang akan diteliti tentang peraturan pembagian kawasan pemakaman Eropa juga didasarkan pada penulisan skripsi tersebut. Pembagian kawasan pemakaman yang sudah ditulis kemudian berusaha peneliti jabarkan dalam pembahasan terkhususkan etnis Eropa.

Keempat, jurnal yang berjudul *Kembang Jepun (Handelstraat) Sebagai Pusat Ekonomi Etnis China di Surabaya Tahun 1906-1930*⁷ yang ditulis oleh Miqdad Nidzam Fahmi. Dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang kehidupan etnis China di Surabaya yang berpusat di wilayah Kembang Jepun atau yang dahulu dikenal sebagai Handelstraat. Selain itu, pada jurnal tersebut juga disinggung tentang kehidupan antar etnis terutama hubungan yang terjalin antara kelompok etnis China dengan kelompok etnis lainnya yang ada di Surabaya.

1.5 Ruang Lingkup

Dengan berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka pada penulisan ini kemudian mengambil ruang lingkup

⁷ Miqdad Nidzam Fahmi, “Kembang Jepun (Handelstraat) Sebagai Pusat Ekonomi Etnis China di Surabaya Tahun 1906-1930” dalam *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, (5): 1.

penelitian untuk menjelaskan pembahasan yang terstruktur dan fokus dalam menjawab permasalahan pada pembahasan.

Pada penelitian ini penulis mengambil ruang lingkup spasial di Surabaya. Hal ini dipilih yakni dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi Kota Surabaya pada masa gemeente. Dengan perkembangan yang cukup pesat pada masa gemeente membuat masyarakat dari berbagai daerah di Surabaya mencoba datang untuk mengadu nasib mereka dalam hal ekonomi. Hal tersebut membuat kondisi Kota Surabaya dengan masyarakatnya menjadi heterogen, keberadaan masyarakat dengan berlatar belakang etnis yang berbeda-beda membuat gemeente Surabaya mengeluarkan kebijakan yang kemudian menyesuaikan dengan keberagaman etnis yang ada pada saat itu.

Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak gemeente seringkali dianggap hanya menguntungkan dan memprioritaskan kelompok etnis Eropa dengan menganggap kelompok masyarakat pribumi sebagai kelompok etnis dengan kasta sosial paling bawah. Gemeente Surabaya mengatur berbagai aktivitas kehidupan masyarakat seluruh kelompok etnis dengan mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh gemeente mengatur banyak hal dari mulai kelas sosial, pemukiman, aktivitas ekonomi, hingga permasalahan kawasan pemakaman. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan tentunya sangatlah ketat. Permasalahan dalam pengambilan

dan pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup besar pada keadaan sosial di masyarakat Surabaya pada saat itu.

Pemilihan tahun yang dibatasi mulai dari tahun 1906-1942 dilatarbelakangi yakni pada tahun 1906 merupakan awal dari terbentuknya gemeente Surabaya. Pada masa sebelumnya, wilayah Kota Surabaya belum terbentuk, Surabaya terbagi menjadi tiga jenis pemerintahan wilayah yakni karisidenan, kabupaten, dan distrik. Hingga dikeluarkannya *Ordonnantie Staatblad* No. 149/1906, otonomi khusus kemudian diberikan dengan dibentuknya gemeente Surabaya. Untuk batasan tahun dibatasi dengan tahun 1942, pemilihan batasan tahun tersebut diambil karena pada tahun 1942 pemerintahan gemeente digantikan dengan pemeritahan militer Jepang yang mulai menduduki dan berkuasa di Surabaya. Pada masa kependudukan Jepang, pemerintah Jepang sangat berfokus pada kebijakan militernya. Hal ini mengakibatkan banyak kebijakan terkait masyarakat lainnya seperti pemeliharaan fasilitas publik yang salah satunya kawasan pemakaman menjadi terhenti. Pada tahun tersebut, kebijakan yang dilaksanakan oleh gemeente sebelumnya kemudian sebagian besar dihapuskan dan diganti dengan kebijakan pemerintahan militer Jepang di Surabaya.

1.6 Kerangka Konsep

Penelitian mengenai kebijakan *Gemeente* Surabaya dalam pembagian kawasan pemakaman berdasarkan etnis dapat mengacu pada penelitian sejarah kota. Kebijakan yang diputuskan oleh gemeente merupakan bagian dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah kota untuk diterapkan dalam masyarakat yang terbagi dalam kelompok etnis yang berbeda-beda. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh gemeente tentunya sebagai bentuk respon terhadap keberagaman etnis yang ada di wilayah Surabaya. Dalam merespon hal tersebut, gemeente kemudian mengambil kebijakan tersebut dengan berbagai tujuan terutama dalam mengatur rakyat Surabaya.

Kawasan pemakaman pada dasarnya merupakan sebuah lahan atau wilayah yang cukup luas untuk digunakan sebagai tempat pemakaman. Biasanya kawasan pemakaman terbagi menjadi kawasan pemakaman yang didasarkan pada etnis tertentu ataupun agama tertentu. Kawasan pemakaman menjadi salah satu hal penting dalam perkembangan kota Surabaya, terlebih pada masa kolonial, pihak gemeente sangat mengawasi segala aktivitas rakyatnya terutama pada kelompok-kelompok etnis. Pengambilan kebijakan dalam membagi kawasan pemakaman tersebut dinilai untuk semakin mengukuhkan pembagian kelompok etnis yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Pada masa kolonial hingga masa gemeente, secara garis besar kelompok etnis terbagi menjadi tiga kelompok besar yakni etnis Eropa, etnis

Timur Asing, dan etnis pribumi. Dengan memperhatikan pada perbedaan etnis dalam masyarakat, hal tersebut kemudian dijelaskan melalui konsep etnisitas yang terjadi pada situasi tersebut.

Menurut Ashmore.dkk, *etnisitas* menyiratkan kekhasan budaya yang dimiliki suatu etnis yang membedakannya dengan etnis lain. Lebih lanjut, etnisitas kemudian dapat dipahami sebagai bentuk unik yang dapat digunakan sebagai identifikasi suatu kelompok etnis tertentu dan membedakannya dengan kelompok etnis lain secara mudah. Tentunya konsep etnisitas yang digunakan oleh gemeente Surabaya pada saat itu dipakai dalam membagi kelompok etnis tertentu untuk dapat mengontrol aktivitas dari kelompok-kelompok etnis tersebut. Etnisitas didasarkan pada hubungan yang terjadi antara etnis dan kebudayaan, akan tetapi sangat rumit dalam pembagiannya lebih rinci. Etnisitas juga bersifat sangat relational dan situasional dimana karakter etnis terlibat di dalamnya.⁸

Pada pengambilan kebijakan masa gemeente sangat memperhatikan tentang kelompok-kelompok etnis yang ada pada masa itu. Hal ini pada dasarnya dapat mempermudah gemeente dalam mengontrol aktivitas masyarakat terutama pada aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan gemeente. Melalui kebijakan yang dikeluarkan kemudian

⁸ Ashmore, R. D., Jussim, L., & Wilder, D. (Eds.). (2001). *Social Identity, Intergroup Conflict and Conflict Reduction*. Oxford University Press.

berusaha untuk mengikat masyarakat Surabaya pada saat itu untuk dapat menjalankan peraturan yang telah diterapkan oleh Gemeente Surabaya. Selain itu kebijakan yang diambil kemudian dapat diartikan sebagai fasilitas publik yang diperuntukan untuk masyarakat Surabaya yang berasal dari berbagai etnis yang berbeda.

Pengambila kebijakan gemeente pada teori dapat dijelaskan melalui teori kebijakan publik. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan public adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.⁹ Pada pengambilan kebijakan pembagian kawasan pemakaman yang didasarkan dengan pembagian etnis yang dilakukan oleh gemeente sangat memperhatikan kepentingan publik. Sesuai dengan teori Thomas R. Dye, kebijakan yang diambil bertujuan demi kepentingan masyarakat.

Dengan didasarkan pada konsep etnisitas dan pengambilan kebijakan publik, kebijakan yang diambil oleh gemeente digunakan sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuannya dalam mengatur masyarakat. Pembagian kawasan pemakaman juga digunakan sebagai penggunaan fungsi pemerintah

⁹ Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: ALFABETA, 2016) hlm. 18

dalam mengontrol aktivitas masyarakatnya dalam hal ini penggunaan kawasan pemakaman yang diperuntukan sesuai dengan pembagian etnis yang sudah ada.

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu ciri dan cara kerja ilmiah yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian sejarah sudah terdapat metode yang disepakati secara umum untuk mengkajinya. Metode yang digunakan dalam penulisan sejarah untuk memperoleh data dan fakta yang harus diungkapkan secara objektif. Dalam penulisan dan merekonstruksi peristiwa sejarah mempunyai metode tersendiri yang dikumpulkan dalam empat tahapan penyusunan, yakni heuristik, kritik interpretasi dan historiografi.

Heuristik yang dikenal dengan nama lain pengumpulan sumber, mengkategorikan dua jenis sumber yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan sejarah, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis yang digunakan dalam penelitian berasal dari arsip dan surat kabar. Pencarian arsip dilakukan melalui pencarian data di website *delpher.nl*. Data yang didapatkan berupa tulisan Belanda sehingga perlu diartikan terlebih dahulu. Selain itu ada surat kabar berupa koran-koran lama melalui website Delpher, ada juga sumber gambar atau foto yang di dapatkan dari web KITLV. Pencarian sumber juga dilakukan dengan mencari arsip-arsip lama yang disimpan di

Bappeda Jawa Timur. Sedangkan Sumber sekunder berupa literasi-literasi terkait dan se-tema yang ditemukan di Perpustakaan Pusat Kampus B Unair, Perpustakaan Ilmu Sejarah Unair.

Tahapan kritik sumber digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan otensitas dan kredibilitas sumber yang sudah terkumpul. Sumber yang telah terkumpul diidentifikasi kembali dan dikaji ulang untuk mendapat kelayakan sumber-sumber yang telah didapatkan penulis. Dari sumber yang diperoleh apakah isinya telah memuat temporal yang telah ditetapkan penulis. Hal tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi penulis.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi atau tahap penafsiran. Tahap ini merupakan tahap kerja dari peneliti sejarah, kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain melalui penafsiran sehingga ketika penyusunan dilakukan, fakta itu menjadi relevan dalam mendukung penulisan. Agar interpretasi dapat membentuk suatu alur cerita yang berlanjut, maka fakta-fakta yang telah ditemukan, disusun berdasarkan urutan kejadian sesuai temporal penelitian dalam babakan waktu yang telah dibuat berdasarkan peristiwa yang ditulis. Dalam melakukan interpretasi ini penulis dibantu dengan sejumlah bahan-bahan Pustaka, buku, jurnal, skripsi maupun artikel yang mengulas topik serupa. Sehingga kemudia dapat masuk dalam tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan sejarah atau tahap Historiografi.

Tahap selanjutnya penulisan sejarah atau historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian kebijakan tentang kawasan pemakaman pada masa gemeente Surabaya. Pada tahapan ini penulis menyajikan secara lengkap bahasan yang telah dipilih. Setelah fakta-fakta yang tersusun secara sistematis diharapkan mampu membentuk kejelasan sejarah yang disusun menjadi tulisan atau hasil dari penelitian sejarah dengan narasi yang baik. Dengan itu didapatkan suatu fakta baru yang berhasil diperoleh dari penelitian ini. Penafsiran atas fakta harus didasari oleh sikap objektif. Meskipun kemungkinan dalam beberapa hal ada yang bersifat subjektif, harus dipakai adalah subjektif yang rasional bukan emosional.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini yang berjudul Kebijakan Peraturan Pembagian Etnis Dalam Kawasan Pemakaman Surabaya Tahun 1906-1942 adalah sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang gambaran umum tentang kondisi Surabaya pada masa kolonial yakni lebih tepatnya pada masa gemeente Surabaya. Dalam bab

tersebut juga dideskripsikan tentang keadaan sosial masyarakat Surabaya dibawah pemerintahan gemeente. Selama masa pemerintahan gemeente Surabaya yang dimulai pada tahun 1906 hingga tahun 1942 ketika kedatangan Jepang, berbagai kebijakan gemeente juga banyak yang dibuat dan dijalankan. Pada hal ini terlebih lagi terkait kebijakan yang erat kaitannya dengan pembagian etnis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemukiman, ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga aspek pemakaman yang diatur dengan didasarkan pada kelas etnis yang ada.

Bab 3 membahas tentang bahasan inti, yaitu tentang keberadaan dan kehidupan masyarakat Eropa di Surabaya selama masa Gemeente. Selain itu, pada bab ini akan dibahas juga kebijakan peraturan pembagian etnis dalam kawasan pemakaman yang dijalankan oleh gemeente Surabaya. Kebijakan tersebut pada dasarnya sudah dijalankan sejak sebelum masa gemeente, akan tetapi kebijakan tersebut hanya berfokus pada pengaturan kawasan pemakaman kelompok etnis Eropa saja. Pada masa pemerintahan gemeente, kebijakan tersebut diperbaharui dengan mengatur kawasan pemakaman bagi kelompok etnis lainnya yakni timur asing dan pribumi.

Kemudian pada Bab 4 berisi penutup dan simpulan dari hasil pembahasan penulisan. Dalam bab ini berisi inti sari maupun hasil simpulan dari pembahasan penulisan. Simpulan dalam bab ini merupakan pembacaan dan

analisis dari pembahasan terhadap data yang ada sekaligus sebagai penutup penulisan.